

Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Oleh:

Fazatul Imro'atus Sholikha (222020100186)

Dosen Pembimbing:

Ahmad Riyadh BM, SH, M.Si, Ph.D

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)

Pendahuluan

- Pelayanan publik adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna menciptakan *good governance* yang berprinsip pada responsivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.
- **Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2003**, pemerintah mengembangkan **e-government** guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Melalui kemajuan teknologi, layanan kini berbasis aplikasi digital, salah satunya **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** sesuai **Peraturan Menteri dalam negeri No. 72 Tahun 2022**, yang memudahkan akses dokumen kependudukan secara digital.
- Penerapan IKD juga mendukung pembuatan **Kartu Identitas Anak (KIA)** sesuai **Permendagri No. 2 Tahun 2016**, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan.

Pendahuluan

Berdasarkan data yang disebutkan sapunusa.id, sejak tahun 2022 jumlah pengguna **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** di Sidoarjo terus mengalami peningkatan, di mana **pada tahun 2022 tercatat sebanyak 17.362** pengguna dan **meningkat menjadi 82.657 pengguna pada tahun 2023**, menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam penerapan layanan administrasi kependudukan digital di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. Jumlah Anak Usia 0 -17 Tahun dan Jumlah Yang ber-KIA

Tahun	Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun (orang)	Jumlah Yang BerKIA (%)
2021	180.155	36.20%
2022	234.067	47.22%
2023	258.788	51.72%

Sumber : [Satu Data Kabupaten Sidoarjo](#) (Open Data Kabupaten Sidoarjo)

Penelitian Terdahulu

- Raveena[8] dalam penelitiannya membahas pengembangan e-government dalam layanan KIA di Kota Tangerang melalui aplikasi IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aplikasi IKD memberikan kemudahan akses serta meningkatkan efisiensi layanan, masih terdapat kendala dalam implementasinya, terutama terkait dengan perlunya peningkatan fitur layanan dan sosialisasi kepada masyarakat guna memaksimalkan pemanfaatannya.
- Rizke[9] mengevaluasi implementasi kebijakan IKD dalam pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan IKD dapat menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan efisiensi layanan.
- Ikhsan[10] dalam penelitiannya mengenai implementasi IKD dalam pelayanan publik di Kabupaten Banyumas menemukan bahwa sistem ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan keamanan data dalam administrasi kependudukan.

Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sidoarjo

Teori

Teori yang digunakan peneliti yaitu

Teori implementasi George C. Edward III

- **Komunikasi (Communication)**
Untuk menjelaskan tingkat kejelasan informasi kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan.
- **Sumber Daya (Resources)**
Mencakup ketersediaan sumber daya manusia, dana, serta sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
- **Disposisi (Disposition)**
Menjelaskan terkait sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.
- **Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)**
Memuat tentang Tata organisasi, prosedur, dan mekanisme kerja yang mengatur proses pelaksanaan kebijakan agar berjalan efektif.

Metode

Metode	: Deskriptif
Pendekatan	: Kualitatif
Lokasi Penelitian	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & MPP Kabupaten Sidoarjo
Teknik Pengumpulan Data	: Wawancara, Observasi, Dokumentasi
Sumber Data (buku, dan penelitian terdahulu)	: Primer (melalui wawancara dengan pihak terkait) dan Sekunder (melalui jurnal, buku, dan penelitian terdahulu)
Teknik Pemilihan Informan	: menggunakan Teknik purposive sampling, (informan terlibat langsung)
Informan	: Petugas Dispendukcapil (administrator Database kependudukan), Masyarakat.
Teori yang digunakan (Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi)	: Teori Implementasi dari George C. Edward III, dengan indikator Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

HASIL- KOMUNIKASI

Keberhasilan program dinilai dari Implementasi komunikasi Disdukcapil dalam menyosialisasikan dan mengaktifasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat. Bukti keberhasilan: program jemput bola telah dilaksanakan di 346 desa secara bergilir, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivasi IKD tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil atau Mal Pelayanan Publik (MPP). Strategi ini membantu meningkatkan akses layanan serta mempermudah pengurusan administrasi kependudukan, termasuk Kartu Identitas Anak (KIA).

Namun, keberhasilan tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui bahwa pengurusan KIA dapat dilakukan melalui aplikasi IKD. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyebaran informasi belum merata.

Hasil Wawancara:

"Saat mengurus KIA, saya mengikuti prosedur manual dan mengantre cukup lama. Setelah diberi tahu bahwa bisa melalui aplikasi IKD, ternyata lebih cepat dan mudah. Sepertinya memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal ini."

— Warga MPP Kabupaten Sidoarjo, 2024



HASIL-SUMBER DAYA

Dalam implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program. Sumber daya yang dimaksud meliputi **SDM yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan anggaran**. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus [3], sumber daya merupakan mesin penggerak program, sehingga tanpa dukungan yang cukup, kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo melalui layanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa aktivasi IKD telah didukung oleh **penugasan 2 petugas khusus di beberapa titik layanan (MPP Sidoarjo, MPP Mini Sukodono, dan Sedati)**. Selain itu, tersedia fasilitas pendukung seperti **PC aktivasi dan Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)** sehingga proses pelayanan dapat diselesaikan kurang lebih 15 menit dan dinilai lebih mudah oleh masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat masukan dari masyarakat terkait perlunya **penambahan SDM serta kejelasan alur dan sistem pelayanan**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang tersedia sudah cukup memadai, tetapi masih perlu dioptimalkan agar implementasi IKD dapat berjalan lebih efektif dan maksimal.

Gambar 1. Mesin ADM



Sumber: Ulasan Masyarakat di MPP Sidoarjo

HASIL-DISPOSISI

Pada aspek disposisi, adalah bagaimana sikap, komitmen, dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan, disposisi menjadi faktor penting karena berkaitan dengan sejauh mana pelaksana memiliki dedikasi dan pemahaman yang sama terhadap tujuan program.

Berdasarkan hasil penelitian yang, para staf pelaksana sudah menunjukkan sikap yang baik. Mereka bekerja **sesuai prosedur, bersikap ramah, serta berusaha memberikan pelayanan maksimal** kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan **adanya komitmen** dalam menjalankan pelayanan publik.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti **masyarakat yang bingung terhadap alur aktivasi IKD, lupa PIN, atau salah memasukkan email saat aktivasi**. Selain itu, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi sejak awal bahwa pembuatan KIA dapat dilakukan melalui aktivasi IKD sehingga tidak perlu menunggu antrean manual.

dari sisi disposisi pelaksana **sudah cukup baik** dan mendukung implementasi kebijakan. Akan tetapi, **perlu adanya peningkatan dalam penyampaian informasi dan pengarahannya kepada masyarakat** agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.



HASIL-STRUKTUR BIROKRASI

Pada aspek struktur birokrasi, bagaimana keberadaan SOP mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjadi penting karena berkaitan dengan kejelasan prosedur, pembagian tugas, serta konsistensi pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan aplikasi IKD dalam pembuatan KIA sebagai berikut:

No.	Standard Operating Procedure Penggunaan IKD untuk Pembuatan KIA
1.	Install aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Playstore.
2.	Isi data berupa NIK, email aktif, nomor handphone, dan lakukan swafoto (selfie) tampak muka.
3.	Scan QR Code ke petugas pelayanan di Dukcapil atau Kecamatan untuk verifikasi.
4.	Buka email yang telah terdaftar dan klik link aktivasi yang dikirimkan ke email.
5.	Masukkan kode aktivasi registrasi dan isi captcha yang tersedia.
6.	Login menggunakan kode aktivasi yang telah diterima.
7.	Ubah password login menjadi 6 (enam) digit angka yang mudah diingat.
8.	Klik menu Data Keluarga, lalu pilih anggota keluarga yang akan dibuatkan KIA.
9.	Setelah biodata tampil, ambil foto anak (usia >5 tahun s.d <17 tahun) dengan klik lingkaran di atas NIK.
10.	Setelah foto terunggah, klik Tap Lainnya → pilih Lihat (untuk menampilkan KIA) atau Bagikan (untuk mencetak di ADM).
11.	Jika ingin mencetak, klik Bagikan, lalu masukkan PIN yang telah dibuat.
12.	Setelah muncul QR Code KIA, buka menu Identitas Kependudukan Digital pada mesin ADM.
13.	Arahkan QR Code KIA ke QR Code scanner pada ADM, lalu KIA akan tampil di layar dan siap dicetak.

Sebagian masyarakat **menyampaikan bahwa prosedurnya mudah dan membantu mempercepat** pelayanan tanpa harus antri secara manual. Namun, di lapangan masih ditemukan adanya **perbedaan informasi antar petugas**, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah SOP sudah diterapkan secara konsisten.

dari sisi struktur birokrasi dan ketersediaan **SOP sebenarnya sudah cukup mendukung implementasi IKD**. Akan tetapi, perlu peningkatan **pemahaman dan konsistensi petugas dalam menerapkan SOP** agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan seragam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pelayanan pembuatan KIA di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara optimal jika ditinjau dari teori George C. Edward III. Komunikasi sudah dilakukan melalui sosialisasi, namun pemahaman masyarakat masih belum merata. Sumber daya telah tersedia, tetapi jumlah SDM dan kejelasan informasi pelayanan masih terbatas. Disposisi pelaksana sudah menunjukkan komitmen yang baik, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam proses aktivasi. Struktur birokrasi telah memiliki SOP, namun penerapannya belum sepenuhnya konsisten.

Secara umum, IKD telah mendukung digitalisasi pelayanan, tetapi masih diperlukan peningkatan sosialisasi, kapasitas SDM, dan konsistensi pelaksanaan agar pelayanan lebih efektif dan merata.

Referensi

- [1] A. Rosadi, A. Rahmawati, And I. Aziz Rosadi, "Penerapan E-Government Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Publik Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Yogyakarta," Jurnal Honai (Jurnal Pendidikan, Administrasi, Sains, Ekonomi, Dan Pemerintahan, Jun. 2024, Doi: 10.61578/Honai.Vol4.No1.Art5.
- [2] Nur Rohman, Endang Wirjatmi Tri Lestari, And Ely Sufianti, "Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta," Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. Vol. 8 No.1, Apr. 2021.
- [3] Agus Widiyarta And Isni Humaidah, "Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya Agus Widiyarta, Isni Humaidah," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 18, Pp. 43–51, 2023, Doi: 10.5281/Zenodo.8310255.
- [4] Agnes A. Fransintia Tukan And Annisa Rahmadanita, "Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur," Jurnal Registratie, Vol. 5, No. 2, Pp. 162–180, Dec. 2023, Doi: 10.33701/Jurnalregistratie.V5i2.3717.
- [5] Y. Iqbal Irfansyah, A. Kabupaten Sidoarjo, P. Jawa Timur Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, P. Skripsi, And Y. Rusfiana, "Inovasi Pelayanan Jemput Bola Terpadu Sidoarjo Yang Gemilang (Jebete Sayang) Pada Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur."
- [6] S. Indrayana Et Al., "Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital," Community Development Journal, Vol. 5, No. 4, 2024.
- [7] Hardito Bastian Munthe, "Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo," 2024.
- [8] R. Aprilia, A. Suherman, And M. I. Rantau, "Pengembangan E-Government Dalam Layanan Kartu Identitas Anak (Kia) Kota Tangerang (Studi Kasus Pada Pengembangan Layanan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital)," Jurnal Mimbar Administrasi, Vol. 21, No. 2, Pp. 61–73, 2024, Doi: 10.56444/Mia.V21i2.2003.
- [9] R. H. Djano, E. I. Suryani, And P. Rahmaini, "Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Penerbitan Administrasi Kependudukan Digital Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung," As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 9, No. 2, P. 93, Nov. 2024, Doi: 10.31602/As.V9i2.14319.
- [10] I. B. Permadi And A. Rokhman, "Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi," Joppas: Journal Of Public Policy And Administration Silampari, Vol. 4, No. 2, Pp. 80–88, Jun. 2023, Doi: 10.31539/Joppas.V4i2.6199.
- [11] V. Salsa Bella And D. Widodo, "Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari," Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6, No. 1, Pp. 14–31, Oct. 2023, Doi: 10.55542/Saraqopat.V6i1.833.
- [12] S. Hintalo, A. Aneta, And R. Tohopi, "Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo," Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 10, No. 1, Pp. 68–86, Apr. 2024, Doi: 10.25299/Jiap.2024.16316.
- [13] S. R. Loupatty, M. A. Rahawarin, And S. Laurens, "Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana Terhadap Kualitas Pelayanan Di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Xx Maluku," Jurnal Ilmiah Global Education, Vol. 6, No. 3, Pp. 1618–1628, Aug. 2025, Doi: 10.55681/Jige.V6i3.4074.
- [14] I. Gede Et Al., "Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward Iii."
- [15] M. I. Rifqy Arifani Politeknik Keuangan Negara Stan Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma Politeknik Keuangan Negara Stan Alamat Korespondensi, "Implementasi Insentif Pajak Di Kpp Pratama Pontianak Timur." [Online]. Available: Www.Jurnal.Pknstan.Ac.Id/Index.Php/Jpi

